

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang, likuiditas dan profitabilitas bank. Kinerja suatu bank dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan laporan itu dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Dengan Analisis rasio keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai kinerja bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pendapatan utama perbankan diperoleh dari pendapatan bunga kredit dari para debitur. Bisnis perbankan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan optimal dengan memberikan pelayanan berupa jasa keuangan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak terlepas dari perencanaan-perencanaan anggaran yang dilakukan di awal tahun sebelum kegiatan operasional perbankan dilaksanakan dan juga perusahaan harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Dalam proses memaksimalkan kinerja perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dimana pihak manajer lebih bertindak untuk kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan pemegang saham perusahaan (masalah agensi). Oleh karena itu perlu adanya suatu mekanisme untuk meminimalkan bahkan menghilangkan tindakan manajemen tersebut. *Corporate governance* merupakan mekanisme yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan perilaku pihak manajemen. Salah satu mekanisme GCG adalah keberadaan komite audit. Komite Audit berfungsi untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berterima umum.

Berjalannya fungsi Komite Audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga manajemen menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian manajemen akan jujur mengelola perusahaan. Sehingga keberadaan komite audit diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan khususnya dalam hal sektor perbankan.

Keberadaan komite audit sebagai implementasi dari penerapan *Good Corporate Government* didukung oleh berbagai berbagai regulasi antara lain, Dalam

praktik perbankan Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 Pasal 12 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit. Komite audit memiliki peranan penting dalam fungsi pengawasan operasional dan sistem pengendalian internal perusahaan. Sehingga Komite Audit memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan.

Efektivitas Komite Audit dapat diketahui melalui pemahaman atas karakteristik-karakteristik yang dimiliki komite audit. Karakteristik tersebut antara lain Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit. Ukuran Komite Audit merupakan jumlah seluruh anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Pasal 41 poin (1) menjelaskan bahwa anggota Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah anggota Komite

Audit adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen akan semakin efektif. Sehingga keberadaan komite audit akan meningkatkan kinerja perusahaan perbankan.

Komite Audit Independen merupakan pihak independen diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/4/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum pasal 38 ayat 4, Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit. Semakin tinggi independensi Komite Audit maka akan lebih mengawasi kinerja perusahaan secara obyektif. Tidak ada tekanan atau kepentingan manajemen. Artinya, kinerja perusahaan akan lebih baik jika diawasi oleh komite audit yang independen.

Rapat dan pertemuan komite audit penting artinya bagi keberhasilan kerja komite audit. Frekuensi pertemuan komite audit harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BI/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja, komite audit mengadakan pertemuan secara berkala paling tidak 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan dalam 1 periode kerja

komite audit. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit adalah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun. Semakin sering komite audit melakukan pertemuan akan semakin efektif dalam memonitori manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kinerja bank.

Beberapa penelitian tentang karakteristik komite audit menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan indikator tiap variabel untuk mengukur komite audit dan kinerja keuangan berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Kuslinah Riniati (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio *Return On Equity* (ROE). Akan tetapi, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Rimardhani et al. (2016) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara komite audit dengan kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio *Return On Asset* (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Prastya dan Nur Cahyonowati (2013) mengatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh signifikan positif pada kinerja perusahaan yang diprosikan dengan *Tobin's Q*. Hal ini berbeda dengan Eksandy Arry (2018) mengatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan independensi komite audit terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan dengan rasio *Return On Asset* (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggitarani (2009) mengatakan bahwa dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio CFROA (*Cash Flow Return On Asset*). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gultom Ulina (2014) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio *Return On Equity* (ROE).

Berdasarkan bukti empiris yang menghubungkan antara karakteristik komite audit yang diukur dengan ukuran komite audit, independensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda, maka tujuan khusus penelitian ini menguji bagaimana pengaruh karakteristik komite audit tersebut terhadap kinerja keuangan terutama pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan?
3. Apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan.
2. Untuk mengetahui apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan.
3. Untuk mengetahui apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai auditing, terutama pemahaman mengenai analisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi dan memeberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan peran sentral komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat menjadi pedoman di dalam berinvestasi dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

4. Bagi Penelitian Mendatang

Penelitian ini dapat menjadi bahan bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antarpemilik perusahaan (*prinsipal*) dengan manajemen (*agen*). Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pemilik perusahaan memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Pemilik yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja. Manajer sebagai agen bertanggung jawab menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan operasi dan meningkatkan laba. Sementara pihak prinsipal melakukan kontrol terhadap kinerja manajer untuk memastikan operasional perusahaan dikelola dengan baik.

Menurut Eisenhardt dalam Masiyah (2010) membagi teori keagenan menjadi 3 (tiga) buah asumsi yaitu : **asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi.**¹ Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*),

¹Masiyah Kholmi, **Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi**, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. *Ekonomika-Bisnis* Juni 2010, Vol.2, No.2, hal.362

dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian menjelaskan konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Asumsi tentang informasi adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah komoditi. Informasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah bagi prinsipaldalam mengontrol dan memonitor kinerja agen.

Asimetri yang terjadi antara prinsipal dengan agen akan membuka peluang bagi pihak agen untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Semakin tinggi asimerti informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Posisi tawar antara prinsipal dengan agen membuat pengambilan keputusan pada perusahaan seringkali menghasilkan keputusan yang bertolak belakang. Prinsipal sebagai pemilik perusahaan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan perusahaan sedangkan agen selaku pelaksana operasional perusahaan menguasai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan. Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain.

Keberadaan komite audit penting dalam memoderasi perilaku tim manajemen yang *preferensi* yaitu dalam memilih suatu alternatif atau keputusan

yang memaksimalkan pribadi mereka daripada kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit yang efektif dan efisien diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan untuk menjaga kinerja yang baik.

2.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Istilah *good corporate governance* pertama kali dikenalkan oleh Cadbury Committee Inggris pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Calbury Report (dalam Sukrisno Agoes, 2006). Menurut Cadbury Committee of United Kingdom, *corporate governance* adalah **“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak direktur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”**.²

Menurut Organisasi of Economic Corporation and Development-OECD (dalam Sukrisno Agoes, 2006) mendefinisikan GCG sebagai **“suatu struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja”**.³

²Sukrisno Agoes, **Etika Bisnis Profesi**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 102

³Loc.cit, hal.104

Menurut KNKG dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) terdapat lima asas dalam menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas (*Responsibility*)**
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Independensi (*Independency*)**
Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.⁴

Intinya Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam kelangsungan hidup usaha yang lebih terjamin dengan konsep bisnis yang beretika.

⁴ Komite Nasional kebijakan Governance, **Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia**, 2006, hal. 5

2.3 Komite Audit

2.3.1 Pengertian Komite Audit

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 Pasal 12 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal No: KEP-339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit. Sesuai dengan keputusan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menyatakan bahwa komite audit adalah:

“suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dandapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.”⁵

Dalam Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, menyatakan **“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.”⁶**

⁵Ibid, hal 15

⁶Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015, **Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit**, 2015, hal.2

Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk para Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu para Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya. Komite audit harus bersifat independen dan juga harus bebas dari pengaruh manajemen perusahaan karena jika komite audit dan manajemen perusahaan memiliki kerja sama maka akan terjadi hal-hal yang dapat mencurigakan bahkan dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit harus bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2.3.2 Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peran dan tanggung jawab Komite Audit secara spesifik akan tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan di mana mereka berada. Setiap perusahaan dapat memiliki variasi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain. Komite Audit harus menjalankan tugasnya berdasarkan tata tertib dan prosedur operasional baku yang ditentukan bersama dengan Dewan Komisaris. Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (2003) secara umum tugas dan tanggung jawab Komite Audit dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar :

- 1. Pelaporan laporan keuangan (*Financial reporting*) yang mencakup:**
 - a. melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standard dan policy akuntansi yang berlaku.**
 - b. melakukan review atas laporan-laporan keuangan terhadap standard dan policy di atas, dan konsistensi terhadap informasi yang diketahui oleh anggota komite audit.**
 - c. melakukan pengawasan audit eksternal, dan melakukan assessment mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan, dan mengenai kepantasan fees yang dibebankan oleh auditor eksternal.**

2. manajemen pengendalian dan resiko (*risk and control management*) yang mencakup:
 - a. melakukan pengawasan proses manajemen resiko dan pengendalian, termasuk pengidentifikasian dari resiko-resiko dan evaluasi dari pengendalian yang dapat memperkecil baik kemungkinan terjadinya maupun dampak dari resiko-resiko tersebut.
 - b. melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua resiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan oleh para auditor.
 - c. meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian resiko-resiko sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, internal dan eksternal.
3. *Corporate Governance* yang mencakup:
 - a. pengawasan terhadap proses corporate governance di perusahaan,
 - b. memastikan bahwa manajemen puncak mempromosikan budaya yang kondusif bagi tercapainya good corporate governance.
 - c. memonitor kepatuhan terhadap code of conduct perusahaan.
 - d. memahami semua permasalahan yang dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan.
 - e. memonitor kepatuhan terhadap segala undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk perusahaan.
 - f. meminta agar auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktek corporate governance di perusahaan, dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.⁷

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk

⁷Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Keberadaan dan Peranan Komite Audit dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance*, 2003, hal. 12

Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.⁸

2.4 Karakteristik Komite Audit

2.4.1 Ukuran Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.4.2 Independensi Komite Audit

Kemandirian dalam menyatakan sikap merupakan independensi dalam komite audit atau seberapa jauh anggota komite audit terlibat di dalam aktivitas perusahaan. Independensi komite audit terkait dengan keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Untuk menjaga independensi komite audit, *pedoman corporate governance* menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lain yang berasal dari luar perusahaan. Dalam Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dijelaskan bahwa

⁸Ibid, hal 6

keanggotaan komite audit independen yaitu berjumlah 51% (lima puluh satu persen). Untuk menjamin independensi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

- a. **wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;**
- b. **wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;**
- c. **wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;**
- d. **bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;**
- e. **wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;**
- f. **bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;**
- g. **bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;**
- h. **tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;**
- i. **Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;**
- j. **tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan**
- k. **tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak**
- l. **langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau**

Perusahaan Publik.⁹

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI,2002).

2.4.3 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Frekuensi pertemuan komite audit secara periodik dilakukan sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja, komite audit mengadakan pertemuan secara berkala paling tidak 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan dalam 1 periode kerja komite audit. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

⁹Ibid, hal 4

Komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan patuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Namun, pada umumnya komite audit bersidang tiga sampai empat kali dalam setahun.

2.5 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya.

Menurut Abdullah dalam Ulina (2014)

“Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan yang merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank

dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia”¹⁰

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 rasio-rasio penilaian perbankan dilihat dari rasio Capital, Asset Quality, Management, Earnings (Profitabilitas), Liquidity, Sensitivity to Market Risk yang dikenal dengan CAMELS. Dimana dalam penelitian ini rasio yang digunakan yaitu rasio earnings (profitabilitas).

2.5.1 Profitabilitas (Earnings)

Profitabilitas perbankan adalah suatu kondisi yang menggambarkan kesanggupan atau kemampuan bank dalam mendapatkan laba. Kemampuan bank untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi bank karena profitabilitas selain merupakan indikator kemampuan bank menjalankan kewajiban juga merupakan cerminan dalam penciptaan nilai bank yang menunjukkan prospek usahanya di masa yang akan datang.

Menurut Kasmir dalam Anwar Arifin (2019)

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-

¹⁰Ulina, **Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal.14

sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan”.¹¹

Profitabilitas menjadi unsur yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bank untuk mengetahui kinerja maupun tingkat kesehatan suatu bank. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan rasio keuangan yaitu profit margin, ROA (*return on assets*), ROE (*return on equity*), ROI (*return on investment*), dan EPS (*earning per share*). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah ROA (*return on asset*).

2.5.1.1 Return On Asset (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. Menurut Ermawati (2014) “**Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi**”.¹² Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula

¹¹Anwar Arifin. **Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.** Jurusan Manajemen (Keuangan), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta. 2019. Hal 478

¹²Ermawati, **Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,** Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014, hal.5

posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: Jumingan, 2011

Alasan dipilihnya ROA sebagai variabel terikat karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan disalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komperhensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. ROA yang semakin besar, menunjukkan kinerja bank semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar. Oleh karena itu ROA merupakan rasio yang tepat digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

2.6 Penelitian Terdahulu

KuslinahRiniati (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan (Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011- 2013). Teknik pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling dengan menggunakan 45 perusahaan sampel yang merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2011-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dan uji F, selain itu juga menggunakan SPSS. 16.0 for Windows. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa terdapat pengaruh positif Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan makanan dan minuman.

Rimardhani et al. (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). Mekanisme GCG diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Profitabilitas perusahaan diukur dengan Return On Asset (ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Teknik pemilihan sampel yaitu dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 12 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan proksi mekanisme

GCG yang lain, yaitu dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

EksandyArry (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG) yang diukur dengan dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia sebanyak 11 bank. Berdasarkan metode *purposive sampling*, sampel yang diperoleh sebanyak 8 bank syariah yang memenuhi kriteria. Data penelitian diperoleh dari annual report selama periode 2011-2014. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan software Eviews for windows versi 9.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara bersama-sama dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit berpengaruh terhadap ROA.

Anggitarani (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Variabel corporate Governance yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris independen, latar belakang *culture* atau etnis presiden

komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite uadit independen, dan jumlah rapat komite audit. Penelitian ini juga leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan CFROA (*Cash Flow Return On Asset*). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 90 perusahaan dari semua sektor industri yaitu *service*, *finance* dan *manufacture* termasuk *mining*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah latar belakang *culture*presiden komisaris, jumlah rapat komite audit. *Leverage* sebagai variabel kontrol juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Gultom Ulina (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menjelaskan pengaruh dari ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 2) frekuensi pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 3) ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	KuslinahRi niati (2015)	Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan (Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2011- 2013)	Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit. Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan <i>Return On Asset</i> (ROA)	Komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
2	Rimardhani et al. (2016)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014).	Variabel Independen: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit Variabel dependen: Kinerja keuangan Return On Asset (ROA)	Secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan proksi mekanisme GCG yang lain, yaitu dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
3	EksandyArry (2018)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah Indonesia	Variabel independen: <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang diukur dengan dewan direksi, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit. Variabel dependen: kinerja keuangan yang diukur dengan <i>Return On Asset</i> (ROA).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara bersama-sama dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syari'ah dan komite audit berpengaruh terhadap ROA.

4	Anggitarani (2009)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<p>Variabel independen: Proporsi dewan komisaris independen, latar belakang <i>culture</i> atau etnis presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite uadit independen, dan jumlah rapat komite audit. <i>Leverage</i> dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.</p> <p>Variabel dependen: Kinerja keuangan CFROA (<i>Cash Flow Return On Asset</i>).</p>	faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah latar belakang <i>culture</i> presiden komisaris, jumlah rapat komite audit. <i>Leverage</i> sebagai variabel kontrol juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
5	Gultom Ulina (2014)	Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<p>Variabel Independen : ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit</p> <p>Variabel dependen: kinerja keuangan ROE (<i>return on asset</i>)</p>	Variabel Ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

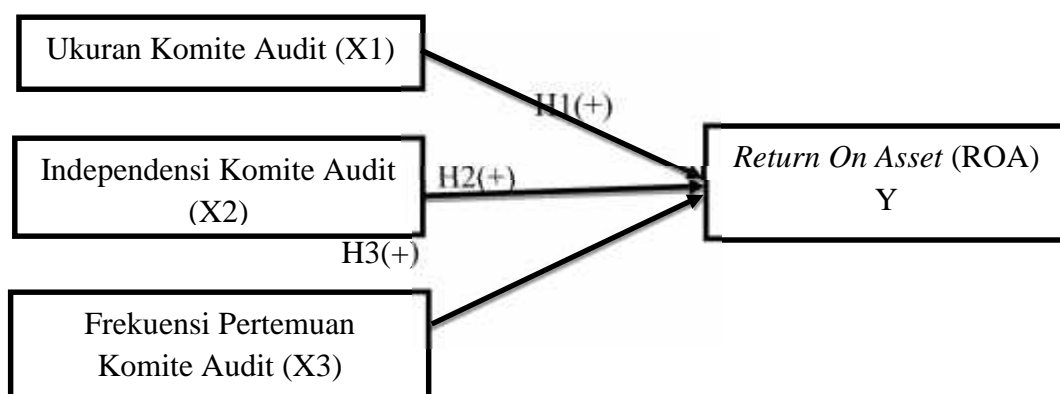
Sumber: Data Diolah Penulis, 2020

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada dasarnya adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Tujuan agar konsep yang menjadi dasar pemikiran peneliti dapat lebih mudah dikomunikasikan dan dipahami.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan yang diuraikan diatas, maka dapat disajikan kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah karakteristik komite audit. Adapun karakteristik komite audit yaitu ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, dan frekuensi rapat komite audit, terhadap variabel dependen kinerja keuangan yaitu ROA (*Return On Asset*).

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data Diolah Penulis, 2020

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

2.8.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Gagasan dasar dalam menentukan komite audit adalah untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan. Dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Pasal 41 poin (1) menjelaskan bahwa anggota Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Penelitian KuslinahRiniati (2015) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga dapat mencegah praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen. Efektifnya fungsi pengawasan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H1 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.8.2 Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam PBI 8/4/2006 pasal 38 ayat 4, diatur mengenai sistem dan porsi keanggotaan independen yaitu berjumlah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Pihak Independen merupakan pihak independen diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Semakin independen komite audit dapat melakukan fungsinya dengan baik. Berdasarkan teori agensi, komite audit

independen akan melaksanakan tugasnya dengan lebih subjektif dan lebih efektif karena tidak memiliki masalah kepentingan yang biasa dialami oleh manajemen, sehingga kinerja dari komite audit dalam menjaga integritas laporan keuangan akan lebih efektif. Akibatnya, kinerja perusahaan juga akan meningkat. Menurut Arifani (2013) menyatakan bahwa komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem penegndalian internal (termasuk audit internal), dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa komite audit independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin banyak komposisi komite audit independen maka kinerja keuangan akan terawasi dengan baik sehingga kinerja akan meningkat

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Independensi Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan

2.8.3 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Keberadaan komite audit mempunyai peran dan pengaruh yang cukup besar bagi perusahaan. Peranan komite audit yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam aspek pengendalian. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya manajemen perusahaan lebih transparan dan terbuka, sehingga *corporate governance* dapat diterapkan dengan baik dan kinerja perusahaan dapat meningkat. Dalam melaksanakan tugasnya komite audit perlu untuk mengadakan rapat yang berfungsi sebagai media

komunikasi dan koordinasi antar anggotanya dalam menerapkan fungsi pelaporan dan pengawasan terhadap perusahaan. Jumlah rapat komite audit mengacu pada kesediaan anggota komite audit untuk bekerja sama dalam mempersiapkan, mengajukan pertanyaan, dan mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak-pihak lain yang relevan (DeZoort, 2002). Semakin sering dilakukan rapat komite audit maka akan terkoordinasi dan tercipta komunikasi yang baik antar anggota dalam melakukan fungsi pengawasannya. Sehingga semakin baik fungsi pengawasan, kinerja keuangan akan lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Anggitarani (2009) pada variabel frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka komite audit melakukan fungsi pengawasan dengan baik, pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis berikut.

H3 : Frekuensi Pertemuan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kausal. Desain kausal berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : ukuran komite audit, independensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit sebagai variabel independen, serta *return on asset*(ROA) sebagai variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok entitas yang lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu, yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Jumlah populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ada sebanyak 135 perusahaan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam melakukan penelitian dan pengujian data. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2010) "**adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel**".¹³ Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sampling

¹³Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Bandung: Alfabeta, 2010, hal 20

jumlah atau sensusteknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 135 perusahaan perbankan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan & data tersebut juga merupakan data sekunder yaitu data yang telah diolah dengan prosedur statistik. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018, melalui situs www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini.
2. Studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder dan seluruh informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dokumen. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data deskripsi komite audit, yang terdiri dari ukuran, independensi, dan pertemuan komite audit dan return on asset (ROA) untuk pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang diunduh melalui website perusahaan dan Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah definisi-definisi yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan arah dan batasan dalam penyelesaian masalah.

3.5.1 Variabel Independen

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit.

1. Ukuran Komite Audit

Variabel ukuran komite audit dinyatakan dengan lambang UKURAN. Berdasarkan Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit terdiri dari sedikitnya 3(tiga) orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen, berasal dari luar Perusahaan Publik. Variabel ini diukur dari jumlah anggota komite audit yang ada dalam satu perusahaan.

$$UKURAN = \text{Jumlah Komite Audit Perusahaan}$$

2. Independensi Komite Audit

Variabel independensi komite audit dinyatakan dengan lambang INDE. Independensi komite audit pada penelitian ini merupakan keadaan dimana para anggota dari komite audit

harus diakui sebagai pihak independen. Anggota komite audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada perusahaan tercatat. Selain itu, para anggota juga tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap perusahaan tercatat atau direksi atau komisaris perusahaan tercatat serta harus bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Variabel ini diukur dari proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah anggota komite audit.

3. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Variabel frekuensi pertemuan komite audit dinyatakan dengan lambing FREK. Berdasarkan Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyatakan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Variabel ini diukur dari jumlah pertemuan rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu tahun.

$$FREK = \text{Jumlah Pertemuan Komite Audit dalam satu tahun}$$

3.5.2 Variabel Dependen

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2017) “**Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen**”.¹⁴Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Variabel kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA dihitung dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EBIT)}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Pengukuran	Skala
Independen:			
Ukuran komite audit	Jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan	Jumlah komite audit perusahaan	Rasio
Independensi komite audit	Jumlah anggota dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.	$\frac{\text{Jumlah anggota komite audit independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota komite audit}}$	Rasio
Frekuensi pertemuan	Jumlah pertemuan komite audit dalam	Jumlah rapat komite audit dalam satu	Rasio

¹⁴Nur Indrianto dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga : BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2017, hal 63

komite audit	satu tahun	tahun	
Dependen : Kinerja perusahaan(Y)	Merupakan rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan asset yang dimiliki. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total asset bank.	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak (EBIT)}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Data dioalah penulis, 2020

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik *software SPSS versi 24*.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai statistik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dengan statistik deskriptif dapat diketahui nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel penelitian terdiri dari ukuran komite audit, independensi komite audit dan pertemuan komite audit sebagai variabel independen dan *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel dependen. Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menilai ada tidaknya bias atas hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dimana dengan menggunakan uji asumsi klasik dapat diketahui sejauh mana hasil analisis regresi dapat diandalkan tingkat keakuratannya.

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dengan uji grafik *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang ditemukan memiliki hubungan linier sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas (dependen). Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , berarti tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 , berarti terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji grafik maupun uji statistik. Uji grafik dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya

(SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi > 0 , sehingga ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar daripada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi < 0 , sehingga ada autokorelasi negatif.
- 4) Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.7. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$Y = a + 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja keuangan dengan ROA

X1 = Ukuran komite audit

X2 = Independensi Komite Audit

X3 = Frekuensi pertemuan komite audit

a = Konstanta

1, 2, 3 = Koefisien regresi

e = Koefisien error

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R Square* dipilih untuk menggeneralisasikan R^2 pada populasi, karena ada unsur estimasi populasi di dalamnya (mengarah pada penelitian populasi). Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar nilai *Adjusted R square* mendekati 1, maka ketepatannya dikatakan semakin baik. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat.

3.8.2 Uji Signifikansi Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara parsial atau pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara melihat tingkat signifikansi atau α , dimana dalam penelitian ini yang digunakan adalah 5%. Untuk melakukan uji t digunakan dengan cara membandingkan nilai P-value dari t dari masing-masing variabel independen terhadap α yaitu 5%.

- a) Bila nilai P value dari t masing-masing variabel independen $> 5\%$ (α), maka $H_0 : b_i = 0$ diterima dan $H_a : b_i \neq 0$ ditolak, artinya secara individual variabel independen X_i tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Sebaliknya bila P value dari t tiap variabel independen $< \alpha$ maka $H_0 : b_i = 0$ ditolak dan $H_a : b_i \neq 0$ diterima, artinya secara individual masing masing variabel independen X_i berpengaruh signifikan pada variabel dependen.

